

Nama : Rahma Noviyana
NPM : 2313031060
Kelas : 23C
Dosen Pengampu : 1. Dr. Pujiati, M.Pd.
2. Dr. Meyta Pritandhari, M.Pd.
3. Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd.

UAS Ekonomi Pendidikan

Soal 1- Efisiensi Anggaran Pendidikan

1. Efisiensi Internal dan Eksternal

Efisiensi Internal

Efisiensi internal pendidikan berkaitan dengan sejauh mana sumber daya yang dialokasikan dalam sistem pendidikan mampu menghasilkan output pendidikan yang optimal, seperti tingkat kelulusan, nilai ujian, dan kualitas proses pembelajaran. Dalam kasus Kabupaten A, anggaran sebesar 30% dari APBD memang tergolong besar dan memenuhi amanat konstitusi, namun penggunaannya menunjukkan ketidakefisienan internal yang cukup serius. Sebagian besar anggaran diarahkan pada pembangunan gedung sekolah baru yang merupakan investasi fisik (infrastruktur), sementara komponen-komponen yang secara langsung memengaruhi kualitas proses belajar-mengajar seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital justru sangat terbatas. Padahal, dalam perspektif efisiensi internal, kualitas output pendidikan sangat bergantung pada mutu proses yang terjadi di dalam kelas. Gedung yang megah tanpa guru yang kompeten dan kurikulum yang relevan tidak akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fakta bahwa angka partisipasi sekolah meningkat tetapi kualitas hasil belajar tidak membaik secara signifikan merupakan indikator kuat bahwa efisiensi internal belum tercapai input besar tidak menghasilkan output yang proporsional.

Efisiensi Eksternal

Efisiensi eksternal pendidikan mengacu pada seberapa jauh output pendidikan (lulusan) mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian, misalnya melalui peningkatan produktivitas kerja, pendapatan, dan daya saing. Dalam kasus ini, karena kualitas hasil belajar siswa tidak meningkat secara berarti, maka output yang

dihasilkan sistem pendidikan Kabupaten A berpotensi tidak siap bersaing di pasar kerja maupun dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Investasi besar yang tidak diikuti oleh peningkatan kompetensi lulusan berarti manfaat sosial dan ekonomi dari pengeluaran anggaran pendidikan tersebut sangat rendah. Dengan kata lain, masyarakat tidak mendapatkan "*return*" yang memadai dari uang yang telah diinvestasikan melalui pajak dan APBD. Ini adalah bentuk kegagalan efisiensi eksternal, karena pendidikan yang dihasilkan tidak mampu mengangkat kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2. Dampak terhadap Kualitas SDM

Kebijakan yang terlalu berfokus pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan kualitas pengajaran berdampak langsung pada rendahnya kompetensi lulusan. Siswa yang belajar di gedung baru tetapi diajar oleh guru yang tidak mendapatkan pelatihan memadai dan tanpa dukungan media pembelajaran yang relevan cenderung hanya memperoleh pendidikan yang bersifat formal dan superfisial. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghasilkan angkatan kerja yang tidak kompetitif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Selain itu, keterbatasan dalam pengembangan kurikulum membuat siswa tidak terpapar pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, literasi digital, dan kemampuan memecahkan masalah, yang justru sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten A perlu melakukan realokasi dan reorientasi anggaran pendidikan secara lebih strategis. Pertama, porsi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan profesional guru harus ditingkatkan secara signifikan, karena guru adalah faktor paling determinan dalam kualitas pembelajaran. Kedua, investasi pada media dan teknologi pembelajaran digital perlu diprioritaskan agar proses belajar menjadi lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga, pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan lokal dan nasional perlu dilakukan secara berkala. Terakhir, pemerintah daerah sebaiknya mengadopsi pendekatan berbasis hasil (*result-based budgeting*) sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat diukur dampaknya secara konkret terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Soal 2-Ketimpangan Akses Pendidikan

1. Bentuk Ketimpangan Pendidikan dalam Kasus Tersebut

Ketimpangan pendidikan yang tergambar dalam kasus ini merupakan ketimpangan akses dan ketimpangan kualitas secara bersamaan. Ketimpangan akses tampak dari perbedaan ketersediaan fasilitas fisik, sekolah perkotaan memiliki laboratorium lengkap dan akses internet cepat, sementara sekolah pedesaan kekurangan fasilitas dasar. Ketimpangan kualitas terlihat dari perbedaan ketersediaan guru profesional: di kota, guru umumnya berpendidikan tinggi dan berpengalaman, sedangkan di desa terjadi kekurangan guru yang cukup prihatin, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Ketimpangan ini dapat dikategorikan pula sebagai ketimpangan geografis dan ketimpangan sosial-ekonomi. Secara geografis, lokasi sekolah di wilayah pedesaan menempatkan siswa pada posisi yang tidak menguntungkan karena minimnya infrastruktur. Secara sosial-ekonomi, keluarga di pedesaan umumnya memiliki pendapatan lebih rendah sehingga kemampuan untuk menutupi kekurangan fasilitas sekolah secara mandiri (seperti les privat atau akses internet pribadi) juga sangat terbatas. Akibatnya, hasil ujian siswa desa secara konsisten berada di bawah siswa kota, yang merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan tersebut.

2. Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Ketimpangan pendidikan yang dibiarkan akan menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Siswa di pedesaan yang menerima pendidikan berkualitas rendah akan tumbuh menjadi tenaga kerja dengan kompetensi terbatas dan hanya mampu mengakses pekerjaan dengan upah rendah, sehingga kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan desa terus melebar dari generasi ke generasi. Dari perspektif teori human capital (Gary Becker), investasi pendidikan yang tidak merata menghasilkan akumulasi modal manusia yang timpang, sehingga produktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan menjadi tidak optimal.

Solusi Kebijakan

Pertama, pemerintah perlu menerapkan skema afirmasi anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan yang lebih besar untuk daerah terpencil. Kedua, program redistribusi guru dengan insentif finansial seperti tunjangan khusus perlu diperkuat agar daerah pedesaan tidak kekurangan tenaga pengajar yang kompeten. Ketiga, perluasan infrastruktur internet dan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari pedesaan perlu diperluas agar mobilitas sosial melalui pendidikan benar-benar dapat terwujud.

Soal 3-Pengangguran Terdidik

1. Analisis Penyebab Pengangguran Terdidik Berdasarkan Teori *Human Capital*

Teori *human capital* (Gary Becker) menyatakan bahwa investasi pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas dan nilai individu di pasar kerja. Namun hal ini hanya berlaku jika pendidikan yang diterima relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam kasus Kota B, fenomena pengangguran terdidik terjadi karena adanya *skills mismatch*, kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan industri. Lulusan cenderung kaya teori tetapi miskin keterampilan praktis, sementara dunia industri terus berkembang lebih cepat dari pembaruan kurikulum. Akibatnya, gelar yang dimiliki hanya menjadi sinyal formal tanpa diikuti kapabilitas yang sesungguhnya.

2. Hubungan Pendidikan dan Pasar Kerja serta Rekomendasi

Hubungan pendidikan dan pasar kerja dalam kasus ini mengalami disfungsi karena perguruan tinggi beroperasi tanpa koordinasi yang baik dengan dunia industri, sehingga penawaran tenaga kerja terdidik tidak sesuai dengan permintaan. Untuk mengatasi hal ini, perguruan tinggi perlu menjalin kemitraan strategis dengan industri melalui program magang wajib dan kurikulum yang dirancang bersama pelaku usaha. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penguatan pendidikan vokasi dan menyediakan sistem informasi pasar kerja yang transparan agar calon mahasiswa dapat mempertimbangkan prospek kerja sebelum memilih program studi.

Soal 4-Kenaikan Biaya Pendidikan

1. Analisis Berdasarkan Konsep Pendidikan sebagai Barang Publik dan Barang Privat

Pendidikan tinggi swasta secara ekonomi lebih mendekati karakteristik barang privat karena bersifat *excludable*, hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu membayar. Namun pendidikan juga memiliki eksternalitas positif yang besar bagi masyarakat, seperti peningkatan produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sebagai barang privat murni. Kenaikan uang kuliah 25% mencerminkan logika barang privat yang mengabaikan dimensi publik pendidikan, karena secara nyata menghalangi akses masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Dampak Sosial Ekonomi

Kenaikan biaya yang signifikan akan mendorong mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan sama sekali. Dalam jangka panjang,

hal ini mempersempit mobilitas sosial dan memperlebar kesenjangan antarkelas, karena akses pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati oleh kalangan ekonomi atas.

3. Perlunya Intervensi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan intervensi karena mekanisme pasar semata tidak dapat menjamin distribusi akses pendidikan yang adil. Bentuk intervensi yang tepat antara lain memperluas program beasiswa seperti KIP Kuliah bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta, memberikan insentif fiskal bagi kampus yang menerapkan kebijakan harga berkeadilan, serta menetapkan regulasi batas maksimal kenaikan uang kuliah per tahun agar tidak memberatkan masyarakat.

Soal 5-Digitalisasi Pembelajaran

1. Analisis Menggunakan Konsep Biaya Pendidikan dan *Opportunity Cost*

Dalam konteks digitalisasi pembelajaran, biaya pendidikan tidak hanya mencakup biaya langsung seperti uang sekolah, tetapi juga biaya tidak langsung berupa pembelian perangkat digital dan kuota internet. Bagi keluarga kurang mampu, biaya-biaya ini sangat memberatkan. Di sinilah konsep *opportunity cost* menjadi relevan, ketika keluarga miskin harus memilih antara membeli kuota internet untuk belajar online atau memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, mereka cenderung memilih yang kedua sebagai keputusan rasional. Akibatnya, partisipasi belajar siswa dari keluarga tidak mampu menurun drastis.

2. Dampak Kesenjangan Digital dan Solusi Kebijakan

Kesenjangan digital menciptakan ketimpangan baru dalam pendidikan, siswa dari keluarga mampu dapat mengakses pembelajaran dengan lancar, sementara siswa kurang mampu tertinggal materi dan mengalami penurunan prestasi. Jika dibiarkan, kondisi ini akan memperburuk ketimpangan ekonomi di masa depan karena lulusan yang tidak melek digital akan semakin tidak kompetitif di pasar kerja. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mendistribusikan perangkat digital secara gratis atau bersubsidi bagi siswa kurang mampu, memperluas akses internet gratis di sekolah dan komunitas, serta menyediakan ruang belajar digital komunal. Selain itu, model pembelajaran *hybrid* yang tidak sepenuhnya bergantung pada perangkat pribadi perlu diterapkan agar tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.